



---

## Analisis Variabel-Variabel yang Memengaruhi Pertumbuhan Inklusif dalam Mendukung Pencapaian Prioritas Pembangunan Sumatera Selatan

Achmad Choirul Huda<sup>1</sup>, Rini Rahani<sup>2\*</sup>)

<sup>1</sup>BPS Kabupaten Muaro Jambi, Indonesia;

<sup>2</sup>Politeknik Statistika STIS, Indonesia;

\*) Penulis Korespondensi : [rinirahani@stis.ac.id](mailto:rinirahani@stis.ac.id);

---

**Abstract.** *Inclusive growth is crucial for ensuring that economic growth is followed by poverty, inequality, and unemployment reduction. Despite experiencing high economic growth, South Sumatra still faces poverty, inequality, and employment. Therefore, the government has prioritized achieving inclusive growth as the first goal of the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD). This research aimed to assess the inclusive growth of cities in South Sumatra using an index developed by Ramos, Ranieri, and Lammens. Panel data regression was used to analyze the variables influencing the inclusive growth index in alignment with the strategies and policies of the RPJMD. The data used in this study was compiled from Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, and Kemendikbudristek. The results indicated that growth inclusiveness fluctuated from 2018 through 2022. The industry productivity, the ratio of hospitals and health centers to the total population, the ratio of the number of schools to the school-age population, and the percentage of the population with internet access had a significant effect on the inclusive growth index in South Sumatra. The government need to focus on developing leading sectors and improving access to healthcare and education to achieve inclusive growth.*

**Keywords:** *development, inclusive growth, panel data regression, RPJMD, South Sumatera.*

**Abstraksi.** *Pertumbuhan inklusif penting dalam pembangunan agar pertumbuhan ekonomi disertai dengan penurunan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Sumatera Selatan adalah salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi memiliki permasalahan kemiskinan, ketimpangan, dan ketenagakerjaan. Untuk itu Pemerintah Sumatera Selatan menetapkan pencapaian pertumbuhan inklusif sebagai tujuan pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pertumbuhan inklusif kabupaten/kota di Sumatera Selatan dengan indeks yang disusun oleh Ramos, Ranieri, dan Lammens. Regresi data panel digunakan untuk menganalisis variabel-variabel yang memengaruhi indeks pertumbuhan inklusif menurut strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD. Data dalam penelitian berasal dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, dan Kemendikbudristek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inklusifitas pertumbuhan berfluktuatif sepanjang tahun 2018–2022.*

*Produktivitas industri pengolahan, rasio rumah sakit dan puskesmas terhadap jumlah penduduk, rasio jumlah sekolah terhadap penduduk usia sekolah, dan persentase penduduk yang mengakses internet signifikan memengaruhi indeks pertumbuhan inklusif di Sumatera Selatan. Pemerintah perlu mengembangkan sektor unggulan serta meningkatkan akses kesehatan dan pendidikan untuk mencapai pertumbuhan inklusif.*

**Kata kunci:** pembangunan, pertumbuhan inklusif, regresi data panel, RPJMD, Sumatera Selatan.

---

diunggah: Agustus 2024; direvisi: November 2024; disetujui: Maret 2025

*This is an open access article under the CC-BY licence*



© the Author(s). 2025

Cara Sitasi: Huda Achmad Choirul, Rahani Rini (2025). Analisis Variabel-Variabel yang Memengaruhi Pertumbuhan Inklusif dalam Mendukung Pencapaian Prioritas Pembangunan Sumatera Selatan. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan*,9(1), 324-352.

<https://doi.org/10.32630/sukowati.v9i1.514>

## PENDAHULUAN

Kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan yang ingin dicapai pemerintah. Pembangunan merupakan proses multidimensional yang meliputi perubahan struktur sosial, tingkah laku, dan institusi nasional sehingga terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan ketimpangan (Todaro & Smith, 2015). Pembangunan seringkali diukur dengan pertumbuhan ekonomi pada awal perekonomian (Islami & SBM, 2018). Meskipun demikian, pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan cenderung mengorbankan aspek pemerataan sehingga kemiskinan dan ketimpangan penduduk makin melebar (Berlianantiya, 2017).

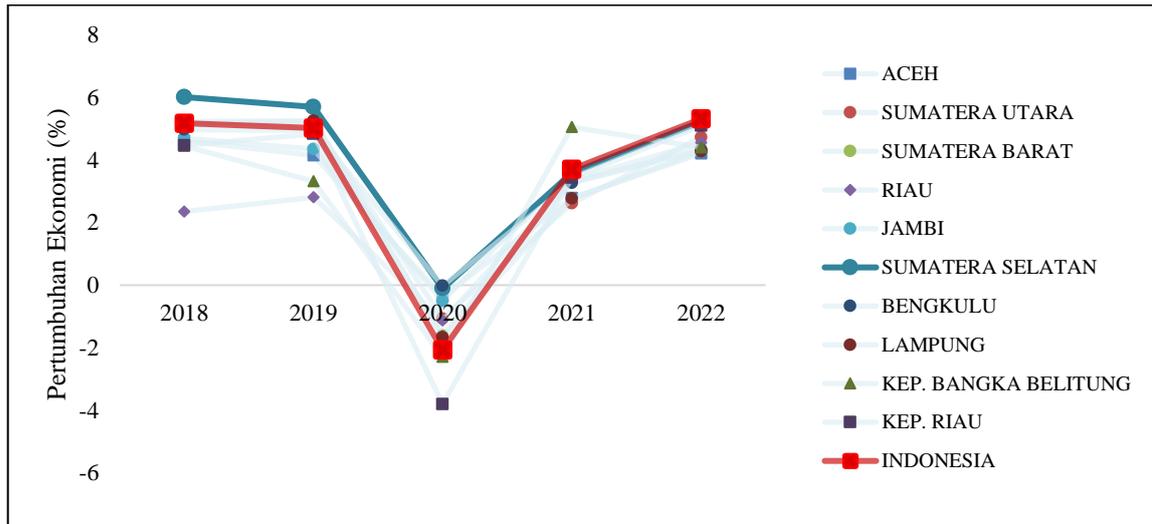
Pembangunan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan per kapita sekaligus mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran agar tujuan pembangunan dapat tercapai (Istiqamah, Syaparuddin, & Rahmadi, 2018). Tujuan pembangunan dapat dicapai salah satunya melalui pertumbuhan inklusif, yaitu proses ekonomi yang dicirikan dengan distribusi keuntungan yang merata dan partisipasi komprehensif seluruh masyarakat dalam perekonomian (Ramos, Ranieri, & Lammens, 2013). Pertumbuhan inklusif terdiri atas tiga komponen, yaitu *pro-growth*, *pro-poor*, dan *pro-job* (Wibowo, 2017). Konsep *pro-growth* memiliki tujuan untuk mencapai angka pertumbuhan yang tinggi (Utama, Khusaini, & Wahyudi, 2017). Konsep *pro-poor* bertujuan agar pertumbuhan memberikan manfaat yang lebih besar kepada penduduk miskin (Kakwani & Pernia, 2000). Terakhir, konsep

*pro-job* dapat menggambarkan kemampuan pembangunan dalam membuka lapangan pekerjaan (Ernawati, Tajuddin, & Nur, 2021).

Pertumbuhan inklusif ditetapkan sebagai agenda pembangunan nasional sejak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014 dan dipertegas dalam RPJMN 2015–2019 yang menyatakan bahwa pertumbuhan inklusif dapat memaksimalkan potensi ekonomi dan menyertakan sebanyak mungkin angkatan kerja sehingga ketimpangan dan kemiskinan berkurang (Bappenas, 2010, 2014). Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib mendukung pembangunan nasional sehingga pencapaian pertumbuhan inklusif turut menjadi salah satu agenda pembangunan daerah.

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang menetapkan pertumbuhan inklusif sebagai prioritas pertama pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019–2023 (Bappeda, 2019, 2021). Pembangunan Sumatera Selatan pada RPJMD 2019–2023 memiliki visi “Sumsel Maju Untuk Semua” dengan tujuan pertama yaitu “Meningkatnya perekonomian yang inklusif berbasis inovasi daerah” yang dipayungi oleh Misi 1 yaitu “Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan”.

Provinsi Sumatera Selatan memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Sumatera (Gambar 1). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018–2020, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional, berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi provinsi lain di Sumatera yang cenderung lebih rendah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Todaro & Smith, 2015).



Gambar 1. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional Tahun 2018–2022

Meskipun memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Provinsi Sumatera Selatan masih menghadapi masalah tingginya kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Berdasarkan data BPS tahun 2018–2022, angka kemiskinan di Sumatera Selatan berada pada rentang 12–13%, lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional dan rata-rata antarprovinsi di Pulau Sumatera. Selain itu, ketimpangan pendapatan Sumatera Selatan lebih besar dibandingkan ketimpangan rata-rata antarprovinsi di Pulau Sumatera. Angka pengangguran di Sumatera Selatan masih berada di atas target yang ditetapkan dalam RPJMD Sumatera Selatan tahun 2022 sebesar 3,45–4,47% meskipun sudah lebih rendah dibandingkan angka pengangguran nasional dan rata-rata antarprovinsi di Sumatera (Bappeda, 2021). Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang tinggi tetapi memiliki angka kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran yang masih tinggi mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum bersifat inklusif. Akibat yang ditimbulkan dari pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif adalah manfaat pembangunan tidak dapat dirasakan oleh seluruh golongan masyarakat.

Tabel 1.

Rentang Angka Persentase Kemiskinan, Gini Rasio, dan TPT Provinsi Sumatera Selatan, Rata-Rata Pulau Sumatera, dan Indonesia Tahun 2018–2022

Indikator	Sumatera Selatan	Rata-Rata Pulau Sumatera	Indonesia
Persentase Kemiskinan	12–13%	9,2–9,81%	9,2–10,2%
Gini Rasio	0,33–0,341	0,31–0,325	0,38–0,385
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,27–5,51%	4,97–6,17%	5,23–7,07%

Pertumbuhan inklusif diperlukan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan dilihat dari kondisi kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran ketika pendapatan meningkat. Pertumbuhan inklusif telah menjadi fokus pembangunan di berbagai negara dan termasuk dalam tujuan kedelapan dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* 2030 yaitu “Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua”. Implementasi SDGs di Indonesia didasarkan pada Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal tersebut mendasari pembangunan nasional dan daerah untuk melaksanakan pencapaian pertumbuhan inklusif. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan beberapa arah dan kebijakan untuk mencapai pertumbuhan inklusif yang tertera dalam RPJMD Sumatera Selatan sebagai berikut (Bappeda, 2019, 2021): (1) Pengembangan industri pengolahan (manufaktur) untuk hilirisasi sumber daya alam (SDA) unggulan dan tenaga kerja lokal; (2) Pengembangan UMKM dan sumber daya manusia (SDM) melalui technopreneur; (3) Pengembangan komoditas unggulan lokal dan diversifikasi pangan; (4) Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan dan kesehatan; (5) Pengkajian dan evaluasi daerah tanpa jaringan listrik; (6) Penyediaan bank data dan informasi ekonomi Sumatera Selatan berbasis realtime dan online, serta peningkatan akses internet.

Pengukuran pertumbuhan inklusif di Sumatera Selatan pernah dilakukan oleh BPS pada tahun 2012, di mana pertumbuhan inklusif Sumatera Selatan merupakan yang terburuk ketiga di Sumatera dengan nilai indeks pertumbuhan inklusif sebesar 5,30 poin. Angka tersebut masih berada di bawah indeks pertumbuhan inklusif nasional yaitu sebesar 5,92 poin (BPS, 2012). Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan penghitungan pertumbuhan inklusif dengan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) dan terakhir dipublikasikan tahun 2021. Provinsi Sumatera Selatan memperoleh IPEI sebesar 6,14 poin, lebih tinggi 0,01 poin dibandingkan IPEI nasional. Meskipun demikian, IPEI tersebut belum dapat disajikan untuk seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Penelitian terkini oleh Purba (2020) mengenai pertumbuhan inklusif kabupaten/kota di Sumatera Selatan tahun 2015–2018 dilakukan dengan analisis kuantitatif deskriptif, kualitatif deskriptif, dan indeks growth inklusif menunjukkan bahwa rata-rata indeks pertumbuhan inklusif masuk ke kategori belum memuaskan. Analisis inferensia masih belum diterapkan untuk mengetahui variabel-variabel yang memengaruhi indeks pertumbuhan inklusif. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan penghitungan pertumbuhan inklusif dengan indeks

yang disusun dari indikator kemiskinan, ketimpangan, dan ketenagakerjaan pada level kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Analisis inferensia dilakukan untuk mengetahui variabel-variabel yang memengaruhi indeks pertumbuhan inklusif sehingga dapat diketahui pengaruh kebijakan pemerintah dalam mencapai pertumbuhan inklusif.

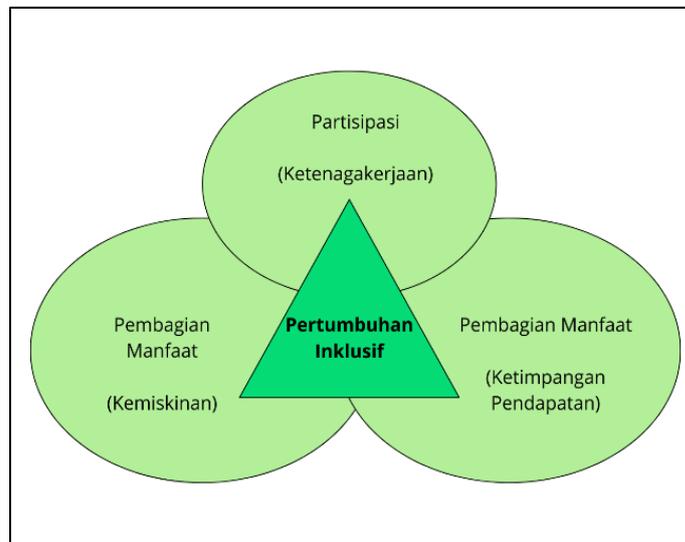
Pencapaian pertumbuhan inklusif dalam RPJMD Sumatera Selatan tersebut dilakukan dengan dukungan dari sektor pertanian, industri, dan UMKM (Bappeda, 2019, 2021). Strategi dan kebijakan yang ditetapkan diharapkan dapat berpengaruh langsung terhadap pencapaian pertumbuhan inklusif. Berdasarkan hal tersebut serta mempertimbangkan ketersediaan data, peneliti menggunakan variabel produktivitas industri pengolahan sebagai pendekatan dari sektor perindustrian, variabel perubahan kredit UMKM sebagai pendekatan dari kondisi UMKM, sektor pertanian didekati dengan produktivitas pertanian, akses kesehatan yang didekati dengan rasio jumlah fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dan puskesmas terhadap jumlah penduduk, akses pendidikan yang didekati dengan rasio jumlah sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah, akses sumber penerangan listrik yang didekati dengan persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik, dan akses internet yang didekati dengan persentase penduduk yang pernah mengakses internet. Hal ini sejalan dengan Teori Modern bahwa faktor-faktor produksi yang penting tidak hanya terkait banyaknya tenaga kerja dan modal tetapi juga kualitas SDM dan kemajuan teknologi (Tambunan, 1996).

Dengan memperhatikan permasalahan yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menghitung indeks pertumbuhan inklusif kabupaten/kota di Sumatera Selatan tahun 2018–2022; (2) mengetahui gambaran umum kondisi komponen penyusun indeks pertumbuhan inklusif Sumatera Selatan tahun 2018–2022; (3) menganalisis pengaruh variabel-variabel yang mencerminkan strategi dan arah kebijakan pemerintah Sumatera Selatan dalam mencapai pertumbuhan inklusif tahun 2018–2022.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data berasal dari Bank Indonesia, BPS, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Penelitian mencakup 13 kabupaten dan 4 kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018–2022 dengan mempertimbangkan implementasi SDGs dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 yang mendasari pembangunan untuk mencapai pertumbuhan inklusif di tingkat daerah dan nasional. Pertumbuhan inklusif diukur

menggunakan indeks pertumbuhan inklusif yang dirumuskan oleh (Ramos et al., 2013). Pertumbuhan inklusif menurut Ramos, Ranieri, dan Lammens dalam *International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-IG)* terdiri atas dua dimensi yaitu pembagian manfaat dan partisipasi yang ditunjukkan oleh Gambar 2.



Gambar 2. Dimensi dan Komponen Pertumbuhan Inklusif

Penghitungan indeks pertumbuhan inklusif oleh (Ramos et al., 2013) dilakukan dengan dua tahapan. Tahap pertama adalah melakukan normalisasi *min-max* untuk komponen kemiskinan dan ketimpangan seperti dalam persamaan (1) berikut:

$$Z'_{itk} = \frac{X_{itk} - X_{itk(\min)}}{X_{itk(\max)} - X_{itk(\min)}} (max^* - min^*) + min^* \dots\dots\dots (1)$$

Sedangkan, dilakukan inverse normalisasi *min-max* untuk komponen ketenagakerjaan seperti persamaan (2) berikut:

$$Z''_{it} = -\frac{X_{itk} - X_{itk(\min)}}{X_{itk(\max)} - X_{itk(\min)}} (max^* - min^*) + min^* + max^* \dots\dots\dots (2)$$

keterangan:

- i* : notasi untuk dimensi individu, *i* = 1, 2, 3, ..., 17
- t* : notasi untuk dimensi waktu, *t* = 2018, 2019, ..., 2022
- k* : notasi untuk dimensi komponen, *k* = kemiskinan, ketimpangan, ketenagakerjaan
- X* : nilai observasi
- Z'\_{itk}* : nilai hasil normalisasi untuk komponen kemiskinan atau ketimpangan pada kabupaten/kota ke-*i* dan waktu ke-*t*

$Z_{it}''$  : nilai hasil normalisasi untuk komponen ketenagakerjaan pada kabupaten/kota ke- $i$  dan waktu ke- $t$

$X_{itk(min)}$  : nilai terkecil dalam kelompok data observasi tahun ke- $t$

$X_{itk(max)}$  : nilai maksimum dalam kelompok data observasi tahun ke- $t$

$min^*$  : nilai terkecil yang diinginkan ( $min^* = 0$  )

$max^*$  : nilai terbesar yang diinginkan ( $max^* = 1$  )

Tahap kedua yakni menghitung rata-rata dari ketiga komponen untuk memperoleh indeks pertumbuhan inklusif seperti persamaan (3) berikut:

$$II_{it} = \frac{Z'_{it1} + Z'_{it2} + Z''_{it}}{3} \dots\dots\dots (3)$$

keterangan:

$II_{it}$  : indeks pertumbuhan inklusif kabupaten/kota ke- $i$  dan waktu ke- $t$

$Z'_{it1}$  : nilai normalisasi *min-max* komponen kemiskinan

$Z'_{it2}$  : nilai normalisasi *min-max* komponen ketimpangan

$Z''_{it}$  : nilai invers normalisasi *min-max* komponen ketenagakerjaan

Indeks pertumbuhan inklusif memiliki rentang nilai nol hingga satu dengan nilai indeks mendekati nol menunjukkan bahwa pertumbuhan inklusif makin baik. Indeks yang diperoleh dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Ramos et al., 2013):

$0 < II \leq 0,2$  : tingkat pertumbuhan inklusif sangat tinggi

$0,2 < II \leq 0,4$  : tingkat pertumbuhan inklusif tinggi

$0,4 < II \leq 0,6$  : tingkat pertumbuhan inklusif menengah

$0,6 < II \leq 0,8$  : tingkat pertumbuhan inklusif rendah

$0,8 < II \leq 1$  : tingkat pertumbuhan inklusif sangat rendah

Analisis deskriptif dilakukan dengan grafik dan peta tematik untuk mengetahui kondisi pertumbuhan inklusif dan analisis inferensia dengan regresi data panel untuk mengetahui variabel-variabel yang memengaruhi indeks pertumbuhan inklusif di Sumatera Selatan. Variabel dependen yang digunakan dalam analisis inferensia adalah indeks pertumbuhan inklusif. Sementara itu, variabel independen yang digunakan adalah data yang dapat menggambarkan arah dan kebijakan pemerintah Sumatera Selatan mencapai pertumbuhan inklusif dan didasarkan oleh RPJMD 2019–2023 seperti yang disajikan pada Tabel 2:

Tabel 2.  
Variabel Independen yang Digunakan dalam Penelitian

Variabel	Notasi	Definisi Operasional	Rujukan	Satuan
Produktivitas industri pengolahan (industri)	$X_1$	PDRB lapangan usaha industri pengolahan dibagi banyak penduduk usia kerja yang bekerja di sektor industri pengolahan.	(Anjum & Tiwari, 2012; Lawrence, 2020; Todaro & Smith, 2015)	Ratus juta rupiah
Posisi kredit UMKM (UMKM)	$X_2$	Posisi kredit UMKM tahunan Bulan Desember oleh Bank Indonesia dengan transformasi logaritma natural.	(Oseni & Oseni, 2015; Singh & Janor, 2013)	Persen (%)
Produktivitas pertanian (pertanian)	$X_3$	PDRB lapangan usaha pertanian dibagi banyak penduduk usia kerja yang bekerja di sektor pertanian.	(Ogundipe, Oduntan, Adebayo, & Olagunju, 2016)	Ratus juta rupiah
Rasio rumah sakit (RS) dan puskesmas terhadap jumlah penduduk (akses kesehatan)	$X_4$	Jumlah fasilitas kesehatan dasar rumah sakit (RS) dan rumah sakit per 10.000 penduduk	(Ali & Son, 2007; C. James, Devaux, & Sassi, 2017)	Per sepuluh ribu penduduk
Rasio jumlah sekolah terhadap penduduk usia sekolah (akses kesehatan)	$X_5$	Jumlah SD, SMP, SMA, dan SMK/ sederajat, baik negeri maupun swasta per 1.000 penduduk usia sekolah (7–18 tahun).	(Adeniyi, Ajayi, & Adedeji, 2021; Ali & Son, 2007)	Per seribu penduduk usia sekolah
Persentase rumah tangga dengan sumber penerangan	$X_6$	Persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik PLN dan non-PLN.	(Gibson & Olivia, 2010; Panjaitan, Mulatsih, &	Persen (%)

Variabel	Notasi	Definisi Operasional	Rujukan	Satuan
listrik (akses listrik)			Rindayati, 2020)	
Persentase penduduk yang mengakses internet (akses internet)	$X_7$	Persentase penduduk usia lima tahun ke atas yang pernah mengakses internet dalam tiga bulan terakhir.	(Jamil, 2022; Xu, Watts, & Reed, 2019; Zhu, Li, Yang, & Balezentis, 2021)	Persen (%)

Model umum regresi data panel yang digunakan adalah sebagai berikut (Baltagi, 2005):

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \beta_6 X_{6it} + \beta_7 X_{7it} + u_{it} \dots\dots\dots (4)$$

keterangan:

- $Y_{it}$  : indeks pertumbuhan inklusif (II)
- $\beta_0$  : konstanta
- $\beta_1, \dots, \beta_7$  : parameter untuk tiap variabel independen
- $X_1$  : Produktivitas industri pengolahan
- $X_2$  : Posisi kredit UMKM
- $X_3$  : Produktivitas pertanian
- $X_4$  : Rasio fasilitas rumah sakit (RS) dan puskesmas terhadap jumlah penduduk
- $X_5$  : Rasio jumlah sekolah terhadap penduduk usia sekolah
- $X_6$  : Persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik
- $X_7$  : Persentase penduduk yang pernah mengakses internet
- $u_{it}$  : komponen error komposit untuk individu ke- $i$  pada waktu ke- $t$
- $i$  : 1, 2, ..., 17 (kabupaten/kota di Sumatera Selatan)
- $t$  : 2018, 2019, ..., 2022 (periode penelitian)

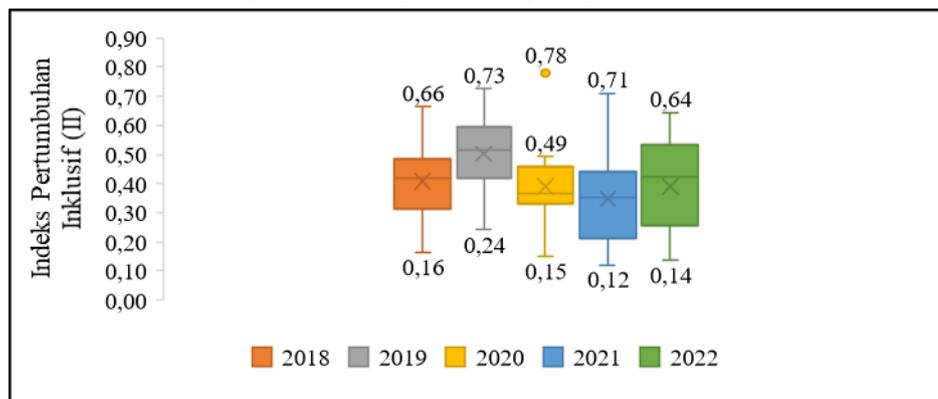
Tahapan yang dilakukan dalam analisis regresi data panel adalah sebagai berikut (Baltagi, 2005; Gujarati & Porter, 2009):

- a. Melakukan spesifikasi model;
- b. Memilih model terbaik antara tiga kemungkinan bentuk, yaitu *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM), dan *random effect model* (REM) dengan Uji Chow, Hausman, dan BP-LM;

- c. Melakukan pengujian pada struktur varians-kovarians residual untuk menentukan metode estimasi yang sesuai jika model terbaik adalah FEM dengan uji *Lagrange Multiplier* (LM) dan *cross-sectional correlation*;
- d. Melakukan pengujian dan pengecekan asumsi klasik regresi data panel sesuai metode estimasi yang digunakan;
- e. Pengujian keberartian model dengan *Overall F-Test*, dan Uji parsial-t;
- f. Melakukan interpretasi terhadap  $R_{adjusted}^2$  dan hasil yang diperoleh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

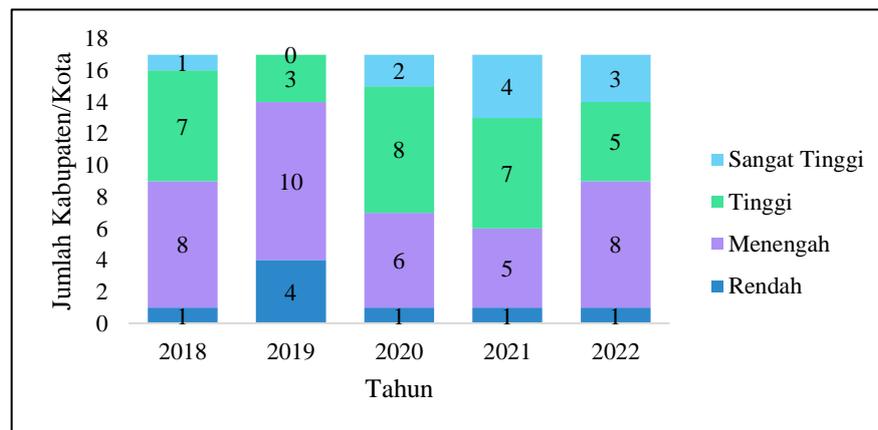
Gambar 3 menunjukkan bahwa median indeks pertumbuhan inklusif kabupaten/kota di Sumatera Selatan berfluktuatif sepanjang tahun 2018–2022. Hal ini menunjukkan inklusivitas pertumbuhan di Sumatera Selatan berfluktuatif pada tahun 2018–2022. Inklusivitas pertumbuhan terburuk terjadi pada tahun 2019 ditunjukkan dengan 50 persen daerah memiliki indeks antara 0,42–0,59 atau berada pada kategori sedang. Kota Palembang adalah daerah dengan inklusivitas pertumbuhan paling rendah tahun 2018–2019 dan Kabupaten Empat Lawang adalah daerah dengan inklusivitas pertumbuhan paling rendah tahun 2020–2022. Kabupaten Empat Lawang menjadi *outlier* atas pada tahun 2020 menunjukkan bahwa inklusivitas pertumbuhan jauh lebih rendah dibandingkan daerah lain. Hal tersebut disebabkan oleh ketimpangan pendapatan yang tinggi dan rasio penduduk bekerja di Empat Lawang adalah yang terendah di Sumatera Selatan.



Gambar 3. Sebaran Indeks Pertumbuhan Inklusif Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2018–2022

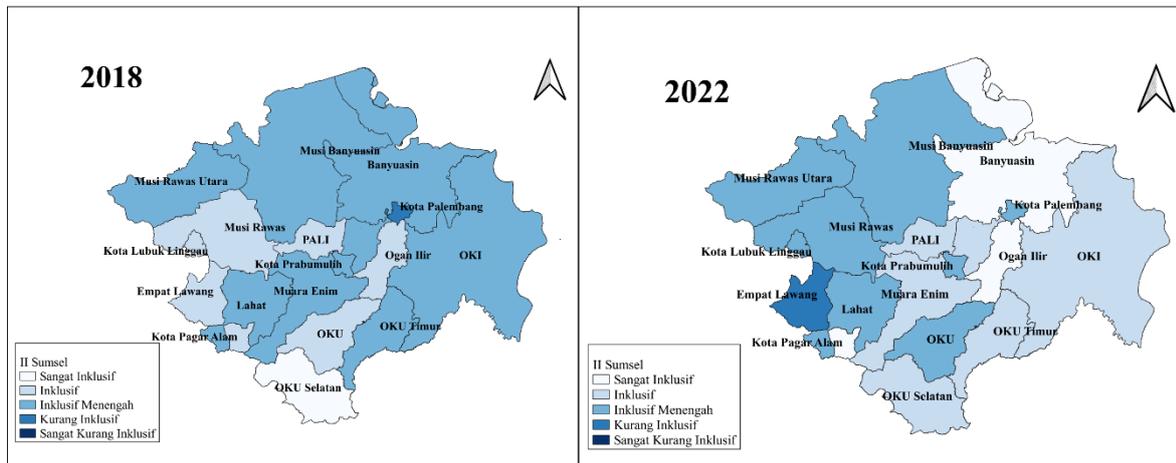
Indeks pertumbuhan inklusif memiliki rentang nilai antara nol hingga satu dengan nilai indeks mendekati nol menunjukkan bahwa pertumbuhan inklusif makin baik. Gambar 4 menunjukkan bahwa sebagian besar daerah memiliki inklusivitas pertumbuhan kategori tinggi dan menengah. Secara umum, pertumbuhan inklusif paling buruk terjadi pada tahun 2019 dengan empat daerah

memiliki pertumbuhan inklusif kategori rendah, yaitu Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, dan Kota Palembang. Pertumbuhan inklusif paling baik terjadi pada tahun 2021 dengan tujuh kabupaten/kota masuk ke kategori tingkat pertumbuhan inklusif tinggi, yaitu Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur), Kabupaten Ogan Ilir, dan Kota Pagar Alam. Pertumbuhan inklusif menurun pada tahun 2022 ditunjukkan dengan kenaikan jumlah daerah yang masuk ke kategori pertumbuhan inklusif menengah dan penurunan jumlah daerah pada kategori pertumbuhan inklusif tinggi dan sangat tinggi.



Gambar 4. Pengkategorian Indeks Pertumbuhan Inklusif Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2018 – 2022

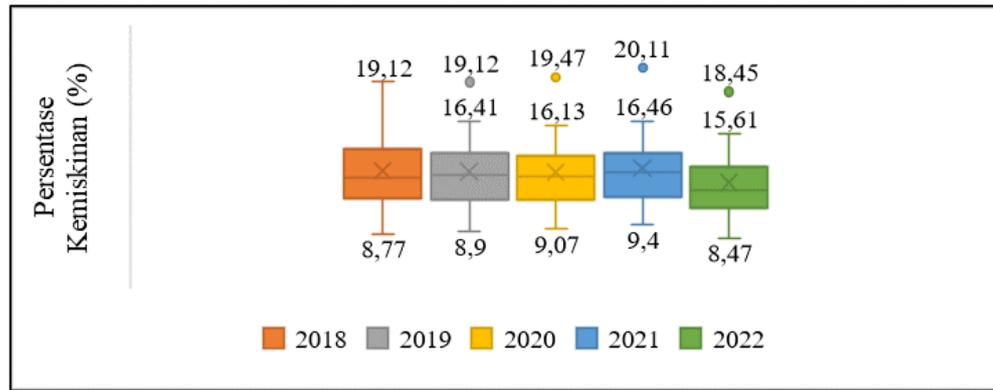
Beberapa daerah di Sumatera Selatan mengalami perubahan tingkat pertumbuhan inklusif pada tahun 2022 dibandingkan 2018. Daerah yang mengalami perbaikan tingkat kategori pertumbuhan inklusif adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Palembang, dan Kota Pagar Alam. Daerah yang mengalami penurunan kategori pertumbuhan inklusif adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan), Kabupaten Empat Lawang, dan Kota Lubuk Linggau. Daerah dengan perbaikan pertumbuhan inklusif mayoritas berada di kawasan timur Sumatera Selatan seperti yang ditunjukkan Gambar 3. Perbaikan pertumbuhan inklusif disebabkan oleh penurunan tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.



Gambar 5. Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Inklusif Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2018 – 2022

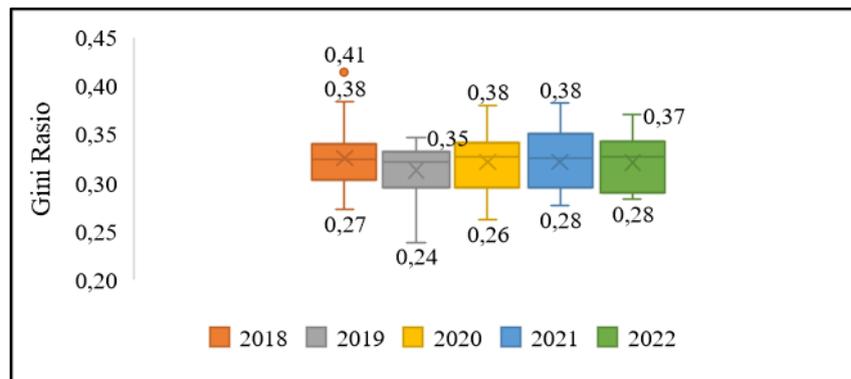
### Gambaran Umum Kondisi Komponen Pertumbuhan Inklusif di Sumatera Selatan

Gambar 6 menunjukkan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Sumatera Selatan secara umum cenderung menurun dari tahun 2018–2022. Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kota Pagar Alam berturut-turut menjadi daerah dengan kemiskinan tertinggi dan terendah di Sumatera Selatan. Nilai *outlier* atas menunjukkan kemiskinan yang sangat tinggi di Musi Rawas Utara dikarenakan Garis Kemiskinan (GK) Musi Rawas Utara meningkat dari tahun ke tahun dan lebih tinggi dibandingkan GK Sumatera Selatan (BPS, 2023b). Hal tersebut menunjukkan biaya hidup layak di Musi Rawas Utara lebih mahal dibandingkan daerah lain. Meskipun demikian, PDRB per kapita Musi Rawas Utara jauh lebih rendah dibandingkan PDRB per kapita Sumatera Selatan (BPS, 2023e). Selain itu, rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat Musi Rawas Utara adalah yang terendah keenam di Sumatera Selatan (BPS, 2023h). Biaya hidup yang tinggi, pendapatan penduduk yang rendah, dan konsumsi masyarakat yang lemah menyebabkan banyak penduduk kesulitan mencukupi kebutuhan dan hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, Kota Pagar Alam adalah daerah dengan GK terendah di Sumatera Selatan tahun 2021 dan 2022 (BPS, 2023b). Biaya hidup layak di Pagar Alam lebih rendah dibandingkan daerah lain sehingga proporsi masyarakat yang dapat mencukupi kebutuhan hidup lebih besar.



Gambar 6. Persentase Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2018–2022

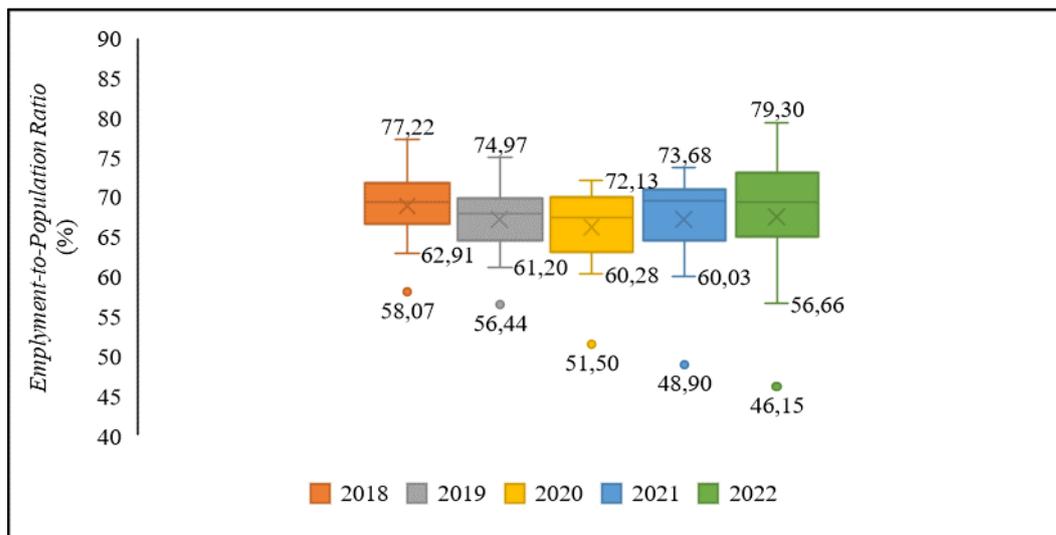
Selanjutnya, Gambar 7 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Sumatera Selatan cenderung konstan dari tahun ke tahun. Nilai *outlier* pada tahun 2018 merepresentasikan Kota Prabumulih memiliki ketimpangan pendapatan yang tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini dilatarbelakangi oleh peningkatan distribusi pengeluaran penduduk kaya sehingga pengeluaran penduduk miskin jauh tertinggal. Terdapat perbedaan kesempatan dalam memperoleh pekerjaan sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan antarpenduduk yang mengakibatkan ketimpangan pengeluaran. Selain itu, faktor lain yang memengaruhi ketimpangan adalah harga komoditas yang fluktuatif, terutama karet dan sawit (Bappeda, 2021).



Gambar 7. Sebaran Gini Ratio Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2018-2022

Komponen EPR pada Gambar 8 menunjukkan penurunan selama tahun 2018–2020 dan meningkat kembali pada tahun 2021. Penurunan EPR mencerminkan penurunan kemampuan ekonomi dalam membuka lapangan kerja baru. Kota Palembang menjadi daerah dengan EPR terendah tahun 2018–2019. Penyerapan tenaga kerja yang belum maksimal di Palembang menyebabkan rendahnya jumlah penduduk bekerja sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat juga rendah

(Bappeda, 2019, 2021). Sementara itu, Kabupaten Empat Lawang menjadi daerah dengan EPR terendah tahun 2020–2022. Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya jumlah penduduk yang bekerja. Empat Lawang mengalami peningkatan jumlah penduduk usia kerja dari tahun ke tahun (BPS, 2022b, 2023d). Meskipun demikian, penduduk yang bekerja mengalami penurunan sejak tahun 2021 (BPS, 2023c). Pengurangan ini menyebabkan rasio penduduk bekerja menjadi berkurang drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.



Gambar 8. Sebaran EPR Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2018-2022

### Analisis Inferensia Regresi Data Panel

Tahap yang pertama dilakukan dalam analisis regresi data panel adalah melakukan pemilihan model terbaik antara CEM, FEM, dan REM. Hasil Uji Chow menunjukkan nilai statistik hitung sebesar 9,9076 dan  $p_{value}$  sebesar 0,0000 sehingga diperoleh keputusan Tolak  $H_0$  pada taraf signifikansi 5 persen dan model FEM lebih baik dibandingkan model CEM. Selanjutnya, Uji Hausman menghasilkan nilai statistik hitung sebesar 32,2928 dan  $p_{value}$  sebesar 0,0000 sehingga diperoleh keputusan Tolak  $H_0$  pada taraf signifikansi 5 persen dan model FEM lebih baik dibandingkan model CEM.

Pengujian struktur varians-kovarians residual perlu dilakukan karena model terbaik yang diperoleh adalah FEM. Uji LM memberikan hasil statistik hitung sebesar 37,2356 dan  $p_{value}$  sebesar 0,019 dengan keputusan uji Tolak  $H_0$  pada taraf signifikansi 5 persen sehingga menunjukkan struktur varians-kovarians *error* bersifat heteroskedastis. Selanjutnya, dilakukan uji *cross-sectional correlation* yang memberikan nilai statistik hitung sebesar 204,4323 dan  $p_{value}$  sebesar 0,0001 dengan keputusan uji Tolak  $H_0$  pada taraf signifikansi 5 persen sehingga dinyatakan bahwa

struktur varians-kovarians *error* memiliki *cross-sectional correlation*. Oleh karena itu, estimasi yang digunakan untuk model FEM adalah *Feasible Generalized Least Square with Seemingly Unrelated Regression* (FGLS-SUR) dengan PCSE karena komponen individu yang lebih banyak dibandingkan komponen waktu (Ekananda, 2016).

Setelah diperoleh estimasi yang tepat, berikutnya dilakukan pengujian dan pengecekan terhadap asumsi klasik agar diperoleh nilai estimator yang bersifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Asumsi klasik yang perlu dipenuhi dalam analisis regresi data panel adalah normalitas, homoskedastisitas, nonautokorelasi, dan nonmultikolinieritas. Meskipun demikian, metode estimasi pada penelitian ini adalah FGLS-SUR sehingga asumsi klasik yang harus dipenuhi hanya normalitas dan tidak terdeteksi terdapat multikolinieritas (Greene, 2012).

Pengujian terhadap asumsi normalitas dilakukan dengan Uji Jarque-Bera untuk mengetahui kenormalan pada distribusi residual. Hasil pengujian menunjukkan nilai statistik hitung JB sebesar 4,19 dengan  $p_{value}$  sebesar 0,1230. Nilai statistik hitung tersebut kurang dari nilai kritis  $\chi^2_{(0,05;2)}$  sebesar 5,991, sehingga diperoleh keputusan gagal tolak  $H_0$ . Dengan tingkat signifikansi 5 persen dapat disimpulkan asumsi normalitas terpenuhi. Pendeteksian terhadap multikolinieritas dilakukan dengan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Makin tinggi nilai VIF maka makin tinggi indikasi terhadap multikolinieritas pada variabel independen (Gujarati & Porter, 2009). Apabila nilai VIF lebih tinggi dari lima maka terindikasi terdapat masalah multikolinieritas (G. James, Witten, Trevor, & Tibshirani, 2013). Berdasarkan hasil pada Tabel 3 dapat dikatakan bahwa tidak terdapat multikolinieritas pada variabel independen yang digunakan untuk membangun model.

Tabel 3.  
Nilai VIF Tiap Variabel Independen

Variabel	VIF
$X_1$	1,1107
$X_2$	2,8064
$X_3$	1,5867
$X_4$	3,8853
$X_5$	2,3728
$X_6$	2,5203
$X_7$	4,4413

Setelah memastikan seluruh asumsi klasik terpenuhi, diperoleh hasil estimasi dari model terbaik FEM sebagaimana dirangkum dalam Tabel 4. Nilai *adjusted R-Squared* yang ditunjukkan adalah sebesar 0,8085 berarti bahwa seluruh variabel independen dapat menjelaskan keragaman indeks pertumbuhan inklusif sebesar

80,85 persen dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar persamaan. Pengujian terhadap signifikansi seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap indeks pertumbuhan inklusif dengan *Overall F-Test* menunjukkan bahwa seluruh variabel independen bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap indeks pertumbuhan inklusif di Sumatera Selatan. Pengujian secara parsial dengan Uji parsial-t dilakukan untuk melihat pengaruh tiap variabel independen terhadap indeks pertumbuhan inklusif. Berdasarkan Tabel 4, diperoleh bahwa variabel produktivitas industri pengolahan, rasio fasilitas RS dan puskesmas terhadap jumlah penduduk, rasio jumlah sekolah terhadap penduduk usia sekolah, dan persentase penduduk yang mengakses internet secara parsial memengaruhi indeks pertumbuhan inklusif.

Tabel 4.  
 Ringkasan Model Terbaik FEM dengan estimasi FGLS-SUR

Variabel	Koefisien	Standar Error	<i>t</i> -statistic	<i>p</i> value
Konstanta	-2,2155	1,5306	-1,4474	0,1529
$X_1^*$	0,0169	0,0080	2,1138	0,0386
$X_2$	0,0348	0,0253	1,3744	0,1743
$X_3$	0,4221	0,3453	1,2223	0,2263
$X_4^*$	-0,3822	0,0865	-4,4184	0,0000
$X_5^*$	0,4171	0,0575	7,2555	0,0000
$X_6$	0,0005	0,0120	0,0458	0,9636
$X_7^*$	-0,0078	0,0010	-7,7568	0,0000

\*signifikan pada taraf uji 5 persen

<i>Statistics Summary</i>			
<i>R-Squared</i>	0,8609	<i>F-Statistics</i>	16,4173
<i>Adjusted R-Squared</i>	0,8085	<i>F-Statistics (probability)</i>	0,0000
<i>Sum Square Residual</i>	0,4791	<i>Durbin-Watson Statistics</i>	2,0544

Berdasarkan Tabel 4, persamaan regresi data panel yang dibentuk adalah sebagai berikut:

$$\widehat{Y}_{it} = (-2,2155 + \widehat{\mu}_i) + 0,0169X_{1it}^* + 0,0348X_{2it} + 0,4221X_{3it} - 0,3822X_{4it}^* + 0,4171X_{5it}^* + 0,0005X_{6it} - 0,0078X_{7it}^* \dots\dots\dots (5)$$

Dalam regresi data panel, FEM akan memberikan efek individu untuk tiap daerah. Pada penelitian ini, Kota Palembang adalah daerah dengan efek individu terbesar di Sumatera Selatan yakni 0,9517 poin. Hal ini menunjukkan bahwa ketika seluruh variabel independen bernilai tetap di seluruh daerah, Kota Palembang

memiliki peningkatan rata-rata indeks pertumbuhan inklusif tertinggi. Sementara itu, Kabupaten OKU Selatan memiliki efek individu terkecil yakni sebesar  $-0,6943$  poin yang menunjukkan apabila seluruh variabel independen bernilai tetap di seluruh daerah, Kabupaten OKU Selatan memiliki peningkatan rata-rata indeks pertumbuhan inklusif paling rendah di Sumatera Selatan.

Nilai estimasi koefisien regresi dari variabel produktivitas industri pengolahan sebesar  $0,0169$  menunjukkan bahwa, secara rata-rata, peningkatan produktivitas industri pengolahan sebesar seratus juta rupiah akan meningkatkan indeks pertumbuhan inklusif di Sumatera Selatan sebesar  $0,0169$  poin dengan asumsi variabel independen lain bersifat konstan. Peningkatan nilai indeks menunjukkan bahwa pertumbuhan di suatu wilayah makin tidak inklusif sehingga peningkatan produktivitas industri pengolahan menyebabkan penurunan pertumbuhan inklusif. Hal tersebut terjadi karena terdapat perubahan pada struktur ekonomi dan tenaga kerja sektor industri. Penelitian terkait menunjukkan bahwa kemajuan teknologi menyebabkan permintaan tenaga kerja dengan pendidikan rendah berkurang sehingga sektor industri pengolahan tidak dapat memberikan kesempatan bekerja bagi lebih banyak penduduk (Lawrence, 2020). Pada periode 2018–2022, tenaga kerja industri di Sumatera Selatan menunjukkan tren menurun meskipun meningkat pada tahun 2021 dan 2022 (BPS, 2023g). Selain itu, kontribusi sektor industri pengolahan ikut berperan dalam pertumbuhan inklusif. Penelitian terdahulu oleh Osei, Atta-Ankomah, & Lambon-Quayefio (2020) menunjukkan terdapat keterkaitan antara penurunan kontribusi sektor industri terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan akibat produktivitas yang rendah. Hal ini sejalan dengan kontribusi sektor industri pengolahan di Sumatera Selatan yang memiliki tren menurun pada tahun 2018–2022 dan lebih rendah dibandingkan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian yang memiliki jumlah tenaga kerja lebih sedikit (BPS, 2023g, 2023a).

Nilai estimasi koefisien regresi untuk variabel rasio fasilitas RS dan puskesmas terhadap jumlah penduduk sebesar  $-0,3822$  menunjukkan bahwa, secara rata-rata, peningkatan rasio fasilitas RS dan puskesmas per 10.000 penduduk sebanyak satu poin akan menurunkan indeks pertumbuhan inklusif di Sumatera Selatan sebesar  $0,3822$  poin dengan asumsi variabel independen lain konstan. Penurunan nilai indeks menunjukkan bahwa pertumbuhan di suatu wilayah makin inklusif sehingga peningkatan rasio fasilitas RS dan puskesmas terhadap jumlah penduduk meningkatkan pertumbuhan inklusif. Hal tersebut terjadi karena peningkatan rasio fasilitas kesehatan dasar akan meningkatkan kesehatan masyarakat selaku pelaku ekonomi sehingga produktivitas meningkat. Sejalan dengan penelitian oleh *The*

*Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, kesehatan penduduk yang baik akan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas karena meningkatkan jumlah investasi dan simpanan penduduk (C. James et al., 2017). Fasilitas kesehatan dasar tersebut harus dapat dirasakan oleh seluruh penduduk sehingga tidak ada ketimpangan pelayanan kesehatan (Sharma, 2019). Dengan demikian, perkembangan fasilitas tersebut akan bersifat pro-poor atau menguntungkan masyarakat miskin (Warr, Menon, & Rasphone, 2013).

Selanjutnya, nilai estimasi koefisien regresi variabel rasio jumlah sekolah terhadap penduduk usia sekolah sebesar 0,4171 menunjukkan bahwa, secara rata-rata, peningkatan rasio jumlah sekolah terhadap penduduk usia sekolah per 1.000 penduduk sebanyak satu poin akan meningkatkan indeks pertumbuhan inklusif di Sumatera Selatan sebesar 0,4171 poin dengan asumsi variabel independen lain bersifat konstan. Peningkatan nilai indeks menunjukkan bahwa pertumbuhan di suatu wilayah makin tidak inklusif sehingga peningkatan rasio jumlah sekolah terhadap penduduk usia sekolah menyebabkan penurunan pertumbuhan inklusif. Hal ini terjadi karena hanya beberapa golongan penduduk yang dapat merasakan pendidikan yang berkualitas di institusi pendidikan favorit. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa anak dari keluarga kaya memiliki akses lebih banyak terhadap pelajaran tambahan sehingga dapat masuk ke sekolah dan universitas favorit yang lebih mudah diserap dunia kerja (Heshmati, Kim, & Wood, 2019). Selain itu, dunia kerja saat ini lebih banyak membutuhkan tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan tinggi sehingga lulusan sekolah menengah cenderung lebih sulit mencari pekerjaan. Permasalahan yang timbul adalah biaya kuliah yang tinggi sehingga hanya kalangan tertentu yang merasakan pendidikan tinggi (Canlas, 2016). Proporsi penduduk Sumatera Selatan yang sedang berkuliah lebih rendah dibandingkan dengan proporsi nasional yang ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK-PT) hanya mencapai 26,31 persen, lebih rendah dibandingkan APK-PT nasional sebesar 31,16 persen (BPS, 2022a).

Nilai estimasi koefisien regresi dari variabel persentase penduduk yang mengakses internet adalah -0,0078 menunjukkan bahwa, secara rata-rata, peningkatan persentase penduduk yang mengakses internet sebanyak satu persen akan menurunkan indeks pertumbuhan inklusif di Sumatera Selatan sebesar 0,0078 poin dengan asumsi variabel independen lain konstan. Penurunan nilai indeks menunjukkan bahwa pertumbuhan di suatu wilayah makin inklusif sehingga peningkatan persentase penduduk yang mengakses internet meningkatkan pertumbuhan inklusif. Hal tersebut terjadi karena peningkatan akses internet dapat membantu pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) dan penurunan kemiskinan (*pro-*

*poor*) dari kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). TIK akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto melalui peningkatan produksi, reorganisasi barang dan jasa, dan pembukaan lapangan kerja baru (Jalava & Pohjola, 2002). Hal tersebut sejalan dengan penelitian Garrity (2015) yang menunjukkan bahwa TIK dapat membantu penurunan kemiskinan karena meningkatkan pendapatan penduduk. Selain itu, Diga, Nwaiwu, & Plantinga (2013) menyatakan bahwa intervensi TIK dalam peraturan pemerintahan dapat meningkatkan partisipasi penduduk miskin.

Terdapat permasalahan dalam kredit UMKM di Sumatera Selatan sehingga tidak berpengaruh pada pertumbuhan inklusif. Sebanyak 60,1 persen industri mikro dan kecil di Sumatera Selatan mengalami kesulitan permodalan pada tahun 2021, meningkat dari tahun 2020 sebesar 27,13 persen. Usaha mikro dan kecil yang melakukan pinjaman usaha hanya sebesar 10,36 persen. Hal tersebut disebabkan karena pemilik usaha tidak mempunyai jaminan sebagai syarat pinjaman (BPS, 2023f). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kemampuan UMKM yang rendah dalam melakukan pinjaman akan membatasi kemampuan usaha untuk berkembang sehingga menimbulkan ketimpangan usaha di masyarakat (Oseni & Oseni, 2015).

Variabel produktivitas pertanian tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pertumbuhan inklusif. Dalam sektor pertanian, terjadi transfer tenaga kerja dari sektor agrikultur ke sektor industri dan jasa yang sejalan. Menurut teori Lewis *Two-Sector Model*, pertanian adalah sektor tradisional dengan produktivitas marjinal tenaga kerja mendekati nol dan terlalu overpopulasi (Todaro & Smith, 2015). Hal tersebut ditunjukkan dengan jumlah tenaga kerja sektor pertanian di Sumatera Selatan tahun 2022 mencapai 1.992.257 jiwa. Apabila dibandingkan dengan sektor industri yang memiliki kontribusi ekonomi lebih besar, jumlah tenaga kerja pertanian enam kali lipat lebih banyak (BPS, 2023g).

Kendala geografis dan gangguan kelistrikan menyebabkan akses listrik tidak memengaruhi pertumbuhan inklusif. Kondisi geografis Sumatera Selatan yang luas menyebabkan desa-desa terpencil belum dapat dijangkau aliran listrik PLN (Bappeda, 2021). Selain itu, tingkat gangguan listrik di Sumatera Selatan adalah salah satu yang terparah di Pulau Sumatera dan nasional. Pada tahun 2022, rata-rata durasi gangguan listrik atau *System Average Interruption Index* (SAIDI) mencapai 13,05 jam/pelanggan dan rata-rata frekuensi gangguan sistem kelistrikan atau *System Average Interruption Index* (SAIFI) mencapai 7,47 pelanggan (PLN, 2023). Gangguan listrik tersebut membatasi aktivitas masyarakat. Program lumbung energi yang dilakukan pemerintah belum mencapai tahap hilirisasi tambang

menjadi energi karena usaha pengadaan listrik dan gas hanya berkontribusi sebesar 0,13–0,15 persen terhadap ekonomi Sumatera Selatan (Bappeda, 2021).

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa indeks pertumbuhan inklusif kabupaten/kota di Sumatera Selatan berfluktuatif pada tahun 2018–2022. Secara umum, pertumbuhan inklusif mencapai titik terendah dan tertinggi berturut-turut pada tahun 2019 dan 2021. Kota Palembang adalah daerah dengan pertumbuhan inklusif paling rendah pada tahun 2018–2019 dan Kabupaten Empat Lawang adalah daerah dengan pertumbuhan inklusif paling rendah pada tahun 2020–2022. Daerah yang mengalami perbaikan tingkat pertumbuhan inklusif pada tahun 2022 dibandingkan 2018 mayoritas berada di wilayah timur Sumatera Selatan dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan daerah yang mengalami penurunan tingkat pertumbuhan inklusif.

Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan cenderung menurun dengan Kabupaten Musi Rawas Utara menjadi daerah dengan kemiskinan tertinggi. Hal tersebut disebabkan oleh biaya hidup yang tinggi dan pendapatan penduduk rendah. Ketimpangan pendapatan cenderung konstan dengan Kota Prabumulih sebagai daerah dengan ketimpangan terparah. Hal itu disebabkan karena terdapat perbedaan kesempatan memperoleh pekerjaan dan harga komoditas yang berfluktuatif. EPR cenderung menurun menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi membuka lapangan kerja berkurang. Kabupaten Empat Lawang memiliki EPR terendah tahun 2020–2022 karena terjadi peningkatan jumlah penduduk usia kerja tetapi penduduk yang bekerja berkurang.

Variabel yang mencerminkan arah kebijakan pemerintah Sumatera Selatan dalam RPJMD secara bersama-sama memengaruhi indeks pertumbuhan inklusif. Peningkatan produktivitas industri pengolahan dan rasio jumlah sekolah terhadap penduduk usia sekolah akan meningkatkan indeks pertumbuhan inklusif. Sementara itu, rasio fasilitas RS dan puskesmas terhadap jumlah penduduk dan persentase penduduk mengakses internet akan menurunkan indeks pertumbuhan inklusif. Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah Sumatera Selatan perlu mengutamakan pengembangan sektor produktif dan padat karya untuk membuka lapangan kerja. Peningkatan akses kesehatan dan pendidikan diperlukan agar produktivitas penduduk meningkat. Pemberian kredit bagi pelaku UMKM dapat dilakukan untuk membantu pengembangan usaha lokal. Adopsi TIK dalam perekonomian perlu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas. Terakhir, masalah gangguan listrik perlu diatasi agar tidak mengganggu kegiatan

ekonomi masyarakat. Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah dapat mengakomposisi variabel jumlah UMKM untuk mengetahui pengaruh perkembangan UMKM terhadap pertumbuhan inklusif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Perpres No. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Adeniyi, O., Ajayi, P. I., & Adedeji, A. A. (2021). Education and inclusive growth in West Africa. *Journal of Economics and Development*, 23(2), 163–183. <https://doi.org/10.1108/JED-04-2020-0036>
- Ali, I., & Son, H. H. (2007). Measuring Inclusive Growth. *Asian Development Review*, 24(01), 11–31. <https://doi.org/10.1142/S0116110507000024>
- Anjum, B., & Tiwari, R. (2012). Role of Manufacturing Industries in India for Inclusive Growth. *ZENITH International Journal of Business Economics & Management Research*, 2(1), 97–104. Retrieved from <https://ssrn.com/abstract=3834461>
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data* (3rd ed.). Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons.
- Bappeda. (2019). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023*. Palembang: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Bappeda. (2021). *Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023*. Palembang: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Bappenas. (2010). *BUKU I RPJMN TAHUN 2010-2014*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bappenas. (2014). *Buku I Agenda Pembangunan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Berlianantiya, M. (2017). Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah kebijakan pembangunan di Provinsi Jawa Timur. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 5(2), 163. <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v5i2.1544>

- BPS. (2012). *Analisis Statistik Lintas Sektor: Analisis Pertumbuhan Inklusif (Inclusive Growth)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2022a). Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Provinsi. Retrieved June 30, 2024, from Badan Pusat Statistik (Tabel Statistik) website: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ0MyMy/angka-partisipasi-kasar--apk--perguruan-tinggi--pt--menurut-provinsi.html>
- BPS. (2022b). Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota. Retrieved May 10, 2024, from BPS Sumatera Selatan (Tabel Statistik) website: <https://sumsel.bps.go.id/indicator/12/262/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>
- BPS. (2023a). Distribusi PDRB ADHB per Sub Kategori (Persen), 2022-2023. Retrieved May 24, 2024, from BPS Sumatera Selatan (Tabel Statistik) website: <https://sumsel.bps.go.id/indicator/100/744/1/distribusi-pdrb-adhb-per-sub-kategori.html>
- BPS. (2023b). Garis Kemiskinan Maret Menurut Kab/Kota (Rp/Kapita/Bulan). Retrieved May 7, 2024, from BPS Sumatera Selatan (Tabel Statistik) website: <https://sumsel.bps.go.id/indicator/23/679/1/garis-kemiskinan-maret-menurut-kab-kota.html>
- BPS. (2023c). Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas Termasuk Angkatan Kerja. Retrieved May 10, 2024, from BPS Sumatera Selatan (Tabel Statistik) website: <https://sumsel.bps.go.id/indicator/6/317/1/jumlah-penduduk-15-tahun-keatas-termasuk-angkatan-kerja.html>
- BPS. (2023d). Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa). Retrieved May 10, 2024, from BPS Kabupaten Empat Lawang (Tabel Statistik) website: <https://empatlawangkab.bps.go.id/indicator/12/44/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>
- BPS. (2023e). Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah). Retrieved May 7, 2024, from BPS Sumatera Selatan (Tabel Statistik) website: <https://sumsel.bps.go.id/indicator/104/860/1/produk-domestik-regional-bruto-per-kapita-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-kabupaten-kota.html>
- BPS. (2023f). *Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi Sumatera Selatan 2021*. Palembang: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.
- BPS. (2023g). *Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka 2023* (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, Ed.). Palembang: BPS Provinsi Sumatera Selatan.
- BPS. (2023h). Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Menurut Kabupaten/Kota (Rupiah). Retrieved May 10, 2024, from BPS Sumatera Selatan (Tabel Statistik) website: <https://sumsel.bps.go.id/indicator/5/699/1/rata-rata-pengeluaran-per-kapita-menurut-kabupaten-kota.html>

- Canlas, D. B. (2016). *Investing in human capital for inclusive growth: Focus on higher education*. Quezon City: Philippine Institute for Development Studies (PIDS). Retrieved from Philippine Institute for Development Studies (PIDS) website: <https://hdl.handle.net/10419/173523>
- Diga, K., Nwaiwu, F., & Plantinga, P. (2013). ICT policy and poverty reduction in Africa. *Info*, 15(5), 114–127. <https://doi.org/10.1108/info-05-2013-0032>
- Ekananda, M. (2016). *Analisis Ekonometrika Data Panel: Teori Lengkap dan Pembahasan Menyeluruh bagi Penelitian Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (2nd ed.). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ernawati, E., Tajuddin, T., & Nur, S. (2021). Does Government Expenditure Affect Regional Inclusive Growth? An Experience of Implementing Village Fund Policy in Indonesia. *Economies*, 9(4), 164. <https://doi.org/10.3390/economies9040164>
- Garrity, J. (2015). ICTs, Income Inequality, and Ensuring Inclusive Growth. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2588115>
- Gibson, J., & Olivia, S. (2010). The effect of infrastructure access and quality on non-farm enterprises in rural Indonesia. *World Development*, 38(5), 717–726. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.11.010>
- Greene, W. H. (2012). *Econometric Analysis* (7th ed.). Harlow: Pearson.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Heshmati, A., Kim, J., & Wood, J. (2019). A Survey of Inclusive Growth Policy. *Economies*, 7(3), 65. <https://doi.org/10.3390/economies7030065>
- Islami, F. S., & SBM, N. (2018). Faktor-faktor Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33(1). <https://doi.org/10.24856/mem.v33i1.564>
- Istiqamah, I., Syaparuddin, S., & Rahmadi, S. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (studi provinsi-provinsi di Indonesia). *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(3), 111–126. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v7i3.6903>
- Jalava, J., & Pohjola, M. (2002). Economic growth in the New Economy: evidence from advanced economies. *Information Economics and Policy*, 14(2), 189–210. [https://doi.org/10.1016/S0167-6245\(01\)00066-X](https://doi.org/10.1016/S0167-6245(01)00066-X)
- James, C., Devaux, M., & Sassi, F. (2017). *Inclusive Growth and Health* (No. 103).
- James, G., Witten, D., Trevor, H., & Tibshirani, R. (2013). *An Introduction to Statistical Learning with Applications in R* (1st ed.). New York: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-0716-1418-1>

- Jamil, H. (2022). Less Inclusive Growth in Indonesia? The Unintended Consequences of Internet Penetration. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 11(2), 197. <https://doi.org/10.26418/jebik.v11i2.53871>
- Kakwani, N., & Pernia, E. M. (2000). What is Pro-poor Growth? *Asian Development Review*, 18(01), 1–16. <https://doi.org/10.1142/S0116110500000014>
- Lawrence, R. Z. (2020). China, Like the US, Faces Challenges in Achieving Inclusive Growth through Manufacturing. *China & World Economy*, 28(2), 3–17. <https://doi.org/10.1111/cwe.12318>
- Ogundipe, A. A., Oduntan, E. A., Adebayo, O., & Olagunju, K. O. (2016). Agricultural Productivity, Poverty Reduction and Inclusive Growth in Africa: Linkages and Pathways. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2856449>
- Osei, R. D., Atta-Ankomah, R., & Lambon-Quayefio, M. (2020). *Structural transformation and inclusive growth in Ghana* (Vol. 2020). UNU-WIDER. <https://doi.org/10.35188/UNU-WIDER/2020/794-1>
- Oseni, E., & Oseni, E. F. (2015). Achieving inclusive economic growth and development in Nigeria through MSMEs. *Journal of Economic & Financial Studies*, 3(04), 30. <https://doi.org/10.18533/jefs.v3i03.126>
- Panjaitan, H. A. M., Mulatsih, S., & Rindayati, W. (2020). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 8(1), 43–61. <https://doi.org/10.29244/jekp.8.1.2019.43-61>
- PLN. (2023). *STATISTIK PLN 2022*. Jakarta: PT PLN (Persero).
- Purba, L. Z. H. (2020). *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2018*. Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Ramos, R. A., Ranieri, R., & Lammens, J.-W. (2013). *Mapping Inclusive Growth* (No. 105). Brasilia. Retrieved from [www.ipc-undp.org](http://www.ipc-undp.org)
- Sharma, J. K. (2019). Inclusive Health-Care: The Best Raw Material for Progressive and Inclusive Growth in India. *International Journal of Applied Science and Engineering*, 7(1). <https://doi.org/10.30954/2322-0465.1.2019.3>
- Singh, S., & Janor, H. (2013). Determinants of SMEs Financing Pattern in India-A Rotated Factor Analysis Approach. *International Journal of Economics and Management*, 7(2), 314–344. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/349759514>
- Tambunan, T. T. H. (1996). *Perekonomian Indonesia: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris* (1st ed.). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). New Jersey: Pearson Education.

- Utama, Z. S., Khusaini, M., & Wahyudi, S. T. (2017). Kebijakan Fiskal di Persimpangan, Pro Growth atau Pro Poor? *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 67–81. <https://doi.org/10.33105/itrev.v2i2.28>
- Warr, P., Menon, J., & Rasphone, S. (2013). *How Expansion of Public Services Affects the Poor: Benefit Incidence Analysis for the Lao People's Democratic*. Manila.
- Wibowo, T. (2017). Ketimpangan Pendapatan dan Middle Income Trap. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 20(2), 111–132. <https://doi.org/10.31685/kek.v20i2.184>
- Xu, X., Watts, A., & Reed, M. (2019). Does access to internet promote innovation? A look at the U.S. broadband industry. *Growth and Change*, 50(4), 1423–1440. <https://doi.org/10.1111/grow.12334>
- Zhu, F., Li, Q., Yang, S., & Balezentis, T. (2021). How ICT and R&D affect productivity? Firm level evidence for China. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 34(1), 3468–3486. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2021.1875861>

### LAMPIRAN

Lampiran 1. Nilai Normalisasi *Min-Max* Komponen Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2018–2022

Kabupaten/Kota	Indeks Pertumbuhan Inklusif				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
OKU	0,371	0,379	0,354	0,301	0,315
OKI	0,629	0,598	0,544	0,493	0,477
Muara Enim	0,366	0,343	0,313	0,273	0,266
Lahat	0,713	0,687	0,662	0,659	0,715
Musi Rawas	0,482	0,437	0,426	0,419	0,488
Musi Banyuasin	0,749	0,735	0,679	0,601	0,673
Banyuasin	0,246	0,238	0,202	0,126	0,153
OKU Selatan	0,181	0,159	0,171	0,161	0,209
OKU Timur	0,174	0,150	0,131	0,112	0,158
Ogan Ilir	0,427	0,432	0,413	0,413	0,387
Empat Lawang	0,336	0,333	0,342	0,369	0,357
PALI	0,487	0,447	0,341	0,328	0,330
Musi Rawas Utara	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Palembang	0,211	0,196	0,175	0,181	0,201
Prabumulih	0,253	0,265	0,242	0,261	0,282
Pagar Alam	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lubuk Linggau	0,411	0,396	0,350	0,358	0,422

Lampiran 2. Nilai Normalisasi *Min-Max* Komponen Ketimpangan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2018–2022

Kabupaten/Kota	Indeks Pertumbuhan Inklusif				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
OKU	0,248	0,750	0,576	0,667	0,736
OKI	0,404	0,380	0,339	0,210	0,115
Muara Enim	0,574	0,778	0,551	0,571	0,425
Lahat	0,234	0,880	0,551	0,200	0,598
Musi Rawas	0,000	0,000	0,000	0,000	0,517
Musi Banyuasin	0,376	0,648	0,500	0,467	0,644
Banyuasin	0,504	0,833	0,517	0,410	0,000
OKU Selatan	0,312	0,778	0,076	0,133	0,023
OKU Timur	0,447	0,343	0,229	0,210	0,506
Ogan Ilir	0,312	1,000	0,458	0,029	0,023
Empat Lawang	0,411	0,731	1,000	0,762	0,575

Lampiran 2. Nilai Normalisasi *Min-Max* Komponen Ketimpangan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2018–2022 (Lanjutan)

Kabupaten/Kota	Indeks Pertumbuhan Inklusif				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PALI	0,177	0,759	0,593	0,514	0,402
Musi Rawas Utara	0,021	0,259	0,212	0,029	0,046
Palembang	0,780	0,981	0,720	0,724	0,736
Prabumulih	1,000	0,972	0,932	1,000	1,000
Pagar Alam	0,199	0,833	0,686	0,486	0,115
Lubuk Linggau	0,362	0,759	0,661	0,800	0,954

Lampiran 3. Nilai Invers Normalisasi *Min-Max* Komponen Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2018–2022

Kabupaten/Kota	Indeks Pertumbuhan Inklusif				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
OKU	0,510	0,497	0,162	0,170	0,295
OKI	0,317	0,307	0,190	0,000	0,198
Muara Enim	0,424	0,417	0,177	0,154	0,154
Lahat	0,448	0,329	0,122	0,379	0,439
Musi Rawas	0,293	0,285	0,077	0,118	0,268
Musi Banyuasin	0,605	0,604	0,010	0,098	0,182
Banyuasin	0,747	0,743	0,472	0,362	0,425
OKU Selatan	0,000	0,000	0,575	0,398	0,515
OKU Timur	0,634	0,606	0,085	0,040	0,419
Ogan Ilir	0,259	0,228	0,232	0,144	0,000
Empat Lawang	0,281	0,269	1,000	1,000	1,000
PALI	0,225	0,221	0,000	0,218	0,159
Musi Rawas Utara	0,380	0,377	0,268	0,343	0,285
Palembang	1,000	1,000	0,517	0,551	0,683
Prabumulih	0,496	0,515	0,272	0,273	0,302
Pagar Alam	0,414	0,386	0,405	0,075	0,309
Lubuk Linggau	0,394	0,394	0,328	0,119	0,418

Lampiran 4. Nilai Indeks Pertumbuhan Inklusif Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2018–2022

Kabupaten/Kota	Indeks Pertumbuhan Inklusif				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
OKU	0,376	0,542	0,364	0,379	0,449
OKI	0,450	0,428	0,358	0,234	0,263
Muara Enim	0,455	0,513	0,347	0,333	0,282
Lahat	0,465	0,632	0,445	0,413	0,584
Musi Rawas	0,258	0,241	0,168	0,179	0,424
Musi Banyuasin	0,576	0,662	0,396	0,389	0,500
Banyuasin	0,499	0,605	0,397	0,299	0,193
OKU Selatan	0,164	0,312	0,274	0,231	0,249
OKU Timur	0,418	0,366	0,148	0,121	0,361
Ogan Ilir	0,333	0,553	0,367	0,195	0,137
Empat Lawang	0,343	0,444	0,781	0,710	0,644
PALI	0,297	0,476	0,312	0,353	0,297
Musi Rawas Utara	0,467	0,545	0,493	0,457	0,444
Palembang	0,664	0,726	0,471	0,485	0,540
Prabumulih	0,583	0,584	0,482	0,512	0,528
Pagar Alam	0,204	0,406	0,364	0,187	0,141
Lubuk Linggau	0,389	0,517	0,446	0,425	0,598